

**PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
<b>BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>6</b>
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	11
<b>BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>12</b>
3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD	12
3.1.1. Pendapatan-LRA	12
3.1.2. Belanja-LRA	23
3.1.3. Pendapatan-LO	32
3.1.4. Beban-LO	37
3.1.5. Aset	38
3.1.6. Kewajiban	55
3.1.7. Ekuitas Dana	59
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.	62
<b>BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>63</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu

entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA  
KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN  
KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI  
NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan guna memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan BPKPAD dalam merealisasikan anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 dan telah melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Ringkasan Perubahan APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Tabel 2.1.1

**Tabel 2.1.1**  
**Ringkasan Perubahan APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung**  
**Tahun Anggaran 2022**

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
<b>5.02.0.00.0.00.04.000</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah</b>		
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>93,945,471,388.00</b>	<b>107,652,797,669.00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	59,010,000,000.00	69,760,000,000.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17,416,596,347.00	20,373,922,628.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17,518,875,041.00	17,518,875,041.00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,589,528,159,800.00</b>	<b>1,612,713,558,467.00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,472,041,917,200.00	1,469,986,011,467.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	117,486,242,600.00	142,727,547,000.00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	1,000,000,000.00

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,683,473,631,188.00</b>	<b>1,721,366,356,136.00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20,008,611,504.00</b>	<b>20,416,599,823.00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	14,141,782,230.00	14,312,066,849.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,866,829,274.00	6,104,532,974.00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,035,142,111.00</b>	<b>2,485,081,311.00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,335,000.00	499,274,200.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,985,807,111.00	1,985,807,111.00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>17,320,650,000.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17,320,650,000.00	2,000,000,000.00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>415,640,235,996.00</b>	<b>418,390,235,996.00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6,901,000,000.00	7,951,000,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	408,739,235,996.00	410,439,235,996.00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>455,004,639,611.00</b>	<b>443,291,917,130.00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>1,228,468,991,577.00</b>	<b>1,278,074,439,006.00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>72,108,410,174.00</b>	<b>129,926,037,132.00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72,108,410,174.00	129,926,037,132.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>72,108,410,174.00</b>	<b>129,926,037,132.00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>8,500,000,000.00</b>	<b>12,680,351,849.00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3,500,000,000.00	7,680,351,849.00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>8,500,000,000.00</b>	<b>12,680,351,849.00</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>63,608,410,174.00</b>	<b>117,245,685,283.00</b>

Pada Tahun Anggaran 2022, BPKPAD Kabupaten Temanggung melakukan Perubahan APBD sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2022 merupakan ukuran kinerja keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang ditampilkan dalam Tabel 2.1.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.1.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Anggaran Perubahan (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Persen tase</b>
<b>5.02.0.00. 0.00.04.00 0</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah</b>			
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.721.366.356.136,00</b>	<b>1.698.622.625.487,00</b>	<b>98,68%</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>107,652,797,669.00</b>	<b>111.844.597.518,00</b>	<b>103,89%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	69,760,000,000.00	74.191.559.232,00	106,35%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,373,922,628.00	21.426.146.839,00	105,16%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17,518,875,041.00	16.226.891.447,00	92,63%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,612,713,558,467.00</b>	<b>1.585.778.027.969,00</b>	<b>98,33%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,469,986,011,467.00	1.448.787.218.335,00	98,56%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142,727,547,000.00	136.990.809.634,00	95,98%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>100,00%</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100,00%

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,721,366,356,136.00</b>	<b>1.698.622.625.487,00</b>	<b>98,68%</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>443.291.917.130,00</b>	<b>435.255.337.305,00</b>	<b>98,19%</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20,416,599,823.00</b>	<b>16.821.948.336,00</b>	<b>82,39%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	14,312,066,849.00	12.909.854.321,00	90,20%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,104,532,974.00	3.912.094.015,00	64,09%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,485,081,311.00</b>	<b>2.460.868.111,00</b>	<b>99,03%</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499,274,200.00	475.061.000,00	95,15%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,985,807,111.00	1.985.807.111,00	100,00%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	0,00	0,00%
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>418,390,235,996.00</b>	<b>415.972.520.858,00</b>	<b>99,42%</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7,951,000,000.00	7.936.684.862,00	99,82%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	410,439,235,996.00	408.035.835.996,00	99,41%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>443,291,917,130.00</b>	<b>435.255.337.305,00</b>	<b>98,19%</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>1,278,074,439,006.00</b>	<b>1.263.367.288.182,00</b>	<b>98,85%</b>

Target pendapatan dalam APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.721.366.356.136,00 dengan realisasi sebesar Rp1.698.622.625.487,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 98,68%. Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp111.844.597.518,00 atau mencapai 103,89% dari target anggaran sebesar Rp107.652.797.669,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.585.778.027.969,00 atau mencapai 98,33% dari target anggaran

sebesar Rp1.612.713.558.467,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% mencapai dari target anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Jika digunakan indikator persentase capaian target anggaran pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0%-100%), secara keseluruhan dapat dikategorikan kinerja keuangan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 yang mencapai 98,68% termasuk dalam kategori baik. Faktor pendorong tercapainya target yaitu:

- (1) Penyesuaian kembali Tarif ketentuan Pajak Daerah, Pemutakhiran Data/Penambahan Data WP dan Penerimaan Denda atas keterlambatan pembayaran pajak daerah (Untuk PBB-2 adanya pengurangan denda keterlambatan sehingga target dapat dipenuhi).
- (2) Tersedianya sistem aplikasi *open tax* dan *e-BPHTB* sebagai alat untuk verifikasi data dengan beberapa instrumen pendukung seperti referensi dan informasi dari berbagai media.
- (3) Tersedianya sistem aplikasi SIAP PAKDE sebagai alat untuk mengolah data pengajuan SKPD reklame, dan meningkatnya kesadaran WP badan (*vendor*) reklame.
- (4) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi.
- (5) Tingkat kesadaran perangkat daerah dalam melaporkan capaian pendapatan terbilang tinggi, disamping itu peran serta dari petugas dalam mengingatkan tentang kewajiban pelaporan pendapatan juga menjadi faktor pendukung tercapainya target serta kesadaran warga dalam membayar pajak daerah.
- (6) Sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPAD dan pemasangan alat rekam transaksi usaha secara elektronik di beberapa tempat usaha.

APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 menetapkan jumlah anggaran belanja daerah sebesar Rp443.291.917.130,00 dengan realisasi sebesar Rp435.255.337.305,00 atau mencapai 98,19% dari anggaran. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp16.821.948.336,00 atau mencapai 82,39% dari anggaran sebesar Rp20.416.599.823,00; Belanja Modal sebesar Rp2.460.868.111,00 atau mencapai 99,03% dari anggaran sebesar Rp2.485.081.311,00; Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00; dan Belanja Transfer sebesar Rp415.972.520.858,00 atau

mencapai 99,42% dari anggaran sebesar Rp418.390.235.996,00. Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja daerah sebagai skala pengukuran kinerja keuangan belanja daerah dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0%-100%), secara keseluruhan dapat dikategorikan kinerja TA 2022 dari penyerapan belanja daerah yang mencapai sebesar 98,19%, termasuk kategori baik.

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam Pencapaian target kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya target kegiatan, antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Belum semua Wajib Pajak mempunyai kesadaran sendiri untuk mendaftarkan objeknya, sedangkan petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas
- (2) PBB-P2 masih bergantung pada peran aktif wajib pajak dan perangkat desa, sedangkan untuk BPHTB masih bergantung pada peran PPAT/PPATS.
- (3) Masih ditemukan perbedaan antara izin dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame.
- (4) Belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara *real time* membuat penyajian informasi capaian pendapatan daerah secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara instan dan cepat.
- (5) Pelaporan yang dilakukan tidak bisa diawal waktu, seringkali terjadi di atas tanggal 7 tiap awal bulannya. hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di perangkat daerah terbatas dan bertumpuknya tugas yang lain membuat pelaporan tidak dapat dilakukan awal waktu.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD**

**3.1.1. Pendapatan-LRA**

Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp 1.698.622.625.487,00 atau 98,68% dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.721.366.356.136,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.721.366.356.136,00</b>	<b>1.698.622.625.487,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>1.692.437.403.975,00</b>
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	107.652.797.669,00	111.844.597.518,00	103,89%	84.559.756.517,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.612.713.558.467,00	1.585.778.027.969,00	98,33%	1.537.846.595.458,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	70.031.052.000,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebesar Rp1.698.622.625.487,00 atau 98,68% dari target sebesar Rp1.721.366.356.136,00. Hal ini disebabkan karena: Kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah melampaui target sebesar 3,89%, meskipun Pendapatan Transfer hanya terealisasi sebesar 98,33% dan Lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sepenuhnya sebesar 100,00%.

Apabila dibandingkan pendapatan tahun 2021 sebesar Rp1.692.437.403.975,00 maka terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp6.185.221.512,00 atau 0,37% dari tahun 2022. Adapun realisasi masing-masing jenis Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

**3.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp111.844.597.518,00 atau 3,89% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp107.652.797.669,00 dan 32,27% lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp27.284.841.001,00. PAD disajikan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>107.652.797.669,00</b>	<b>111.844.597.518,00</b>	<b>103,89%</b>	<b>84.559.756.517,00</b>
1.	Pajak Daerah	69.760.000.000,00	74.191.559.232,00	106,35%	52.832.020.942,00
2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.373.922.628,00	21.426.146.839,00	105,16%	19.633.082.917,00
3.	Lain-lain PAD yang Sah	17.518.875.041,00	16.226.891.447,00	92,63%	12.094.652.658,00

Realisasi masing-masing jenis PAD tahun anggaran 2022 dan 2021 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

**3.1.1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LRA**

PAD yang berasal dari pendapatan pajak daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung meliputi pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, PBB-P2 serta BPHTB yang dikelola oleh Bidang Pendapatan BPKPAD. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp74.191.559.232,00 atau 106,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp69.760.000.000,00, dengan demikian realisasi pajak daerah tahun anggaran 2022 melampaui target sebesar Rp4.431.559.232,00 atau 6,35%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.359.538.290,00 atau 40,43% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp52.832.020.942,00. Lebih rinci mengenai realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2022 digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>69.760.000.000,00</b>	<b>74.191.559.232,00</b>	<b>106,35%</b>	<b>52.832.020.942,00</b>
1.	Pajak Hotel	200.000.000,00	228.153.674,00	114,08%	165.229.973,00
2.	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.870.817.379,00	143,54%	2.125.018.457,00
3.	Pajak Hiburan	100.000.000,00	100.279.100,00	100,28%	14.158.750,00
4.	Pajak Reklame	750.000.000,00	813.975.191,00	108,53%	832.726.326,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000,00	21.185.723.472,00	100,88%	17.219.779.238,00
6.	Pajak Parkir	130.000.000,00	144.889.706,00	111,45%	101.799.300,00
7.	Pajak Air Tanah	320.000.000,00	350.576.370,00	109,56%	311.626.105,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	25.000.000.000,00	25.651.580.898,00	102,61%	15.589.594.933,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.260.000.000,00	22.845.563.442,00	112,76%	16.472.087.860,00

Realisasi penerimaan 9 pajak daerah TA 2022 seluruhnya telah melampaui target. Jika dibandingkan dengan TA 2021 dari keseluruhan 9 Pajak Daerah mengalami kenaikan. Maka kinerja keuangan Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dapat dikatakan baik.

### 3.1.1.1.2 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN-LRA

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh BPKPAD Kabupaten Temanggung bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Pada TA 2022 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp20.373.922.628,00 dengan realisasi sebesar Rp21.426.146.839,00 atau 105,16% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

#### **Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	

	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>20.373.922.628,00</b>	<b>21.426.146.839,00</b>	<b>105,1%</b>	<b>19.633.082.917,00</b>
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.373.922.628,00	21.426.146.839,00	105,1%	19.633.082.917,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 mengalami kenaikan dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.793.063.922,00 atau 9,13% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp19.633.082.917,00.

### 3.1.1.1.3 LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LRA

Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp17.518.875.041,00 dengan realisasi sebesar Rp16.226.891.447,00 atau sebesar 92,63% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>17.518.875.041,00</b>	<b>16.226.891.447,00</b>	<b>92,63%</b>	<b>12.094.652.658,00</b>
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00%	255.721.208,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000,00	1.978.408.221,00	98,92%	1.794.121.622,00
3.	Jasa Giro	4.802.806.765,00	467.911.281,00	9,74%	737.226.286,00
4.	Pendapatan Bunga	6.316.890.000,00	8.406.164.287,00	133,07%	7.208.630.169,00
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23.500.000,00	13.250.000,00	56,38%	8.900.000,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.365.678.276,00	3.586.094.365,00	106,55%	146.264.256,00
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	90.337.565,00	903,38%	25.799.201,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	1.684.725.728,00	168,47%	1.917.989.916,00

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.132.238.789,00 atau 34,17% dibandingkan penerimaan TA 2021 sebelumnya yaitu sebesar Rp12.094.652.658,00.

### 3.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LRA

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Pada tahun 2022 pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.612.713.558.467,00 dengan realisasi sebesar Rp1.585.778.027.969,00 atau mencapai 98,33% dari anggaran. Jika dibanding dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.537.846.595.458,00 pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp47.931.432.511,00 atau 3,12%. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.612.713.558.467,00</b>	<b>1.585.778.027.969,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>1.537.846.595.458,00</b>
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.469.986.011.467,00	1.448.787.218.335,00	98,56%	1.385.928.637.379,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.727.547.000,00	136.990.809.634,00	95,98%	151.917.958.079,00

#### 3.1.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA

Pada tahun 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.469.986.011.467,00 dengan realisasi sebesar Rp1.448.787.218.335,00 atau mencapai 98,56% dari anggaran. Jika dibanding dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.385.928.637.379,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp62.858.580.956,00 atau 4,54%. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN TRANSFER	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.469.986.011.467,00</b>	<b>1.448.787.218.335,00</b>	<b>98,56%</b>	<b>1.385.928.637.379,00</b>
1.	Dana Perimbangan	1.221.668.106.467,00	1.200.469.313.335,00	<b>98,26%</b>	1.120.897.599.379,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	2.438.134.000,00	2.438.134.000,00	<b>100,00%</b>	17.149.213.000,00
3.	Dana Desa	245.879.771.000,00	245.879.771.000,00	<b>100,00%</b>	247.881.825.000,00

### 3.1.1.2.1.1 DANA PERIMBANGAN-LRA

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pada TA 2022 pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.221.668.106.467,00 dengan realisasi sebesar Rp1.200.469.313.335,00 atau mencapai 98,26% dari yang dianggarkan. Jika dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.120.897.599.379,00 pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp79.571.713.956,00 atau 7,10%.

**Tabel 3.8**

### **Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan-LRA TA 2022**

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.221.668.106.467,00</b>	<b>1.200.469.313.335,00</b>	<b>98,26%</b>	<b>1.120.897.599.379,00</b>
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	64.111.879.000,00	67.967.761.249,00	106,01%	66.832.564.275,00

2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	751.613.837.000,00	751.613.837.000,00	100,00%	753.140.119.000,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	153.727.447.000,00	141.115.030.563,00	91,80%	131.534.286.845,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	252.214.943.467,00	239.772.684.523,00	95,07%	169.390.629.259,00

Penjelasan :

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan Pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (ketimpangan vertikal). Persentase dana bagi hasil (DBH) Pajak untuk setiap sumber dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penetapan alokasi DBH pajak dilakukan melalui peraturan menteri keuangan. Pendapatan bagi hasil pajak yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), Cukai Hasil Tembakau dan Sumber Daya Alam. Transfer dana perimbangan pemerintah pusat-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 dianggarkan sebesar Rp64.111.879.000,00 dengan realisasi sebesar Rp67.967.761.249,00 atau 106,01% dari anggaran. Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan sebesar Rp1.135.196.974,00 atau naik 1,70% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp66.832.564.275,00.
- Transfer dana alokasi umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah bertujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing. Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 dianggarkan sebesar Rp751.613.837.000,00 dengan realisasi sebesar Rp751.613.837.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Penerimaan DAU TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar

Rp1.526.282.000,00 atau 0,20% dibandingkan dengan penerimaan TA 2021 sebesar Rp753.140.119.000,00.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-DAK Fisik TA 2022 dianggarkan sebesar Rp153.727.447.000,00 dengan realisasi sebesar Rp141.115.030.563,00 atau 91,80% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp9.580.743.718,00 atau 7,28% bila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp131.534.286.845,00.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik TA 2022 dianggarkan sebesar Rp252.214.943.467,00 dengan realisasi sebesar Rp239.772.684.523,00 atau 95,07% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik mengalami peningkatan sebesar Rp70.382.055.264,00 atau 41,55% bila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp169.390.629.259,00.

### 3.1.1.2.1.2 DANA INSENTIF DAERAH (DID)-LRA

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan berupa Dana Insentif Daerah pada TA 2022 dengan anggaran Rp2.438.134.000,00 telah terealisasi sepenuhnya atau 100,00%. Dari realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp17.149.213.000,00 turun sebesar Rp14.711.079.000,00 atau 85,78%. Rincian DID dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**

#### **Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID)-LRA TA 2022**

No	Pendapatan	Tahun 2022
----	------------	------------

	Transfer Pemerintah Pusat	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp) Tahun 2021
	Dana Insentif Daerah (DID)	2.438.134.000,00	2.438.134.000,00	100,00%	17.149.213.000,00
1.	DID	2.438.134.000,00	2.438.134.000,00	100,00%	17.149.213.000,00

### 3.1.1.2.1.3 DANA DESA-LRA

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa sebagai komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. DD ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa; mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal; meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa; meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Anggaran Dana Desa pada TA 2022 sebesar Rp245.879.771.000,00 dan terealisasi sepenuhnya atau 100,00%. Jika dibandingkan Realisasi TA 2021 sebesar Rp247.881.825.000,00 dapat dikatakan turun sebesar Rp2.002.054.000,00 atau 0,81%.

**Tabel 3.10**

#### **Anggaran dan Realisasi Dana Desa-LRA TA 2022**

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Dana Desa	245.879.771.000,00	245.879.771.000,00	100,00%	247.881.825.000,00
1.	Dana Desa	245.879.771.000,00	245.879.771.000,00	100,00%	247.881.825.000,00

### 3.1.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH -LRA

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada TA 2022 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan

tersebut dianggarkan sebesar Rp142.727.547.000,00 dengan realisasi sebesar Rp136.990.809.634,00 atau 95,98%. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan sebesar Rp14.927.148.445,00 atau 9,83% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp151.917.958.079,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.11**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN TRANSFER	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>142.727.547.000,00</b>	<b>136.990.809.634,00</b>	<b>95,98%</b>	<b>151.917.958.079,00</b>
1.	Pendapatan Bagi Hasil	126.752.547.000,00	122.999.737.000,00	97,04%	114.087.366.818,00
2.	Bantuan Keuangan	15.975.000.000,00	13.991.072.634,00	87,58%	37.830.591.261,00

#### 3.1.1.2.2.1 PENDAPATAN BAGI HASIL-LRA

Pendapatan bagi hasil adalah Pendapatan bagi hasil pajak atas pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pendapatan bagi hasil TA 2022 sebesar Rp122.999.737.000,00 atau 97,04% dari anggaran sebesar 126.752.547.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp114.087.366.818,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.912.370.182,00 atau 7,81%.

**Tabel 3.12**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>126.752.547.000,00</b>	<b>122.999.737.000,00</b>	<b>97,04%</b>	<b>114.087.366.818,00</b>
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	126.752.547.000,00	122.999.737.000,00	97,04%	114.087.366.818,00

#### 3.1.1.2.2.2 BANTUAN KEUANGAN-LRA

Bantuan keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2022 adalah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi dengan anggaran sebesar

Rp15.975.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp13.991.072.634,00 atau 87,58%. Dibandingkan dengan TA 2021 dengan realisasi sebesar Rp37.830.591.261,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.839.518.627,00 atau 63.02%.

**Tabel 3.13**  
**Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>15.975.000.000,00</b>	<b>13.991.072.634,00</b>	<b>87,58%</b>	<b>37.830.591.261,00</b>
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.975.000.000,00	13.991.072.634,00	87,58%	37.830.591.261,00

### 3.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2022 dianggarkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Sedangkan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.031.052.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp69.031.052.000,00 atau 98,57%. Penurunan ini terjadi karena pada TA 2022 Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak terdapat lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pendapatan Hibah Dana BOS).

**Tabel 3.14**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN DAERAH	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.031.052.000,00</b>
1.	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	571.300.000,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	0,00	0,00	0,00%	69.459.752.000,00

	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
--	--	--	--	--	--

### 3.1.1.3 .1 PENDAPATAN HIBAH-LRA

Pendapatan Hibah – LRA merupakan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri pada TA 2022 BPKPAD Kabupaten Temanggung. Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp571.300.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp428.700.000,00 atau 75,04% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.15**

#### **Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah-LRA TA 2022**

No	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>571.300.000,00</b>
1.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	571.300.000,00

### 3.1.2. BELANJA-LRA

Belanja Daerah adalah belanja yang ada dalam LRA dengan realisasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebesar Rp435.255.337.305,00 atau 98,19% dari target Rp443.291.917.130,00. Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2022 berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer dengan anggaran dan realisasi yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.16**

#### **Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah-LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>443.291.917.130,00</b>	<b>435.255.337.305,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>425.701.772.156,00</b>
1.	BELANJA OPERASI	20.416.599.823,00	16.821.948.336,00	82,39%	15.919.964.257,00
2.	BELANJA MODAL	2.485.081.311,00	2.460.868.111,00	99,03%	2.490.000,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	0	0,00%	5.779.500.000,00
4.	BELANJA TRANSFER	418.390.235.996,00	415.972.520.858,00	99,42%	403.999.817.899,00

Realisasi belanja daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.553.565.149,00 atau naik 2,24% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp425.701.772.156,00.

### 3.1.2.1 BELANJA OPERASI-LRA

Belanja Operasi dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp16.821.948.336,00 atau 82,39% dari anggaran sebesar Rp20.416.599.823,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari Rp12.909.854.321,00 (90,20%) realisasi belanja pegawai dan Rp3.912.094.015,00 (64,09%) realisasi belanja barang dan jasa. Terdapat koreksi pengembalian atas belanja operasi (Belanja Pegawai) sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>605.000,00</b>

Tabel 3.17

### Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi-LRA TA 2022

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.416.599.823,00</b>	<b>16.821.948.336,00</b>	<b>82,39%</b>	<b>15.919.964.257,00</b>

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Pegawai	14.312.066.849,00	12.909.854.321,00	90,20%	11.935.340.218,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	6.104.532.974,00	3.912.094.015,00	64,09%	3.984.624.039,00

Realisasi belanja Operasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp901.984.079,00 atau naik 5,67% dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp15.919.964.257,00.

### 3.1.2.1 .1 BELANJA PEGAWAI-LRA

Belanja Pegawai TA 2022 dianggarkan sebesar Rp14.312.066.849,00 dengan realisasi sebesar Rp12.909.854.321,00 atau 90.20% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.18**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai-LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.312.066.849,00</b>	<b>12.909.854.321,00</b>	<b>90,20%</b>	<b>11.935.340.218,00</b>
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.121.671.849,00	6.713.292.540,00	94,27%	6.283.286.829,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.367.300.000,00	2.191.651.781,00	92,58%	2.311.670.889,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.157.335.000,00	3.562.315.000,00	85,69%	3.340.382.500,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	665.760.000,00	442.595.000,00	66,48%	0,00

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2021 maka dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp974.514.103,00 atau naik 8,16%. Pada Tahun 2021 Rekening Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH belum disediakan sehingga untuk pencatatan realisasinya masuk dalam rekening Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

### 3.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA - LRA

Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dianggarkan sebesar Rp6.104.532.974,00 dengan realisasi sebesar Rp3.912.094.015,00 atau 64,09% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.19**

#### **Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA BARANG DAN JASA	6.104.532.974,00	3.912.094.015,00	64,09%	3.984.624.039,00
1.	Belanja Barang	1.451.124.274,00	1.187.536.371,00	81,84%	1.225.740.818,00
2.	Belanja Jasa	3.365.774.500,00	1.943.459.009,00	57,74%	1.708.907.024,00
3.	Belanja Pemeliharaan	159.795.000,00	129.227.974,00	80,87%	115.441.115,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	632.839.200,00	254.158.911,00	40,16%	208.471.774,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	495.000.000,00	397.711.750,00	80,35%	726.063.308,00

Realisasi belanja Barang dan Jasa TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp72.530.024,00 atau turun 1,82% dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp3.984.624.039,00.

### 3.1.2.2 BELANJA MODAL-LRA

Pada Tahun 2022 realisasi Belanja Modal senilai Rp2.460.868.111,00 atau 99,03% dari anggaran Rp2.485.081.311,00. Realisasi Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Komputer, Printer, Alat Ukur, dan Server) senilai Rp475.061.000,00 (95,15%) dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (untuk menyelesaikan Administrasi gedung BPKPAD) senilai Rp1.985.807.111,00 (100,00%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.20**

#### **Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.485.081.311,00</b>	<b>2.460.868.111,00</b>	<b>99,03%</b>	<b>2.490.000,00</b>
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.274.200,00	475.061.000,00	95,15%	2.490.000,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.985.807.111,00	1.985.807.111,00	100,00%	0,00

Realisasi belanja modal TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.458.378.111,00 atau naik 98730,04% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.490.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa pengadaan pada Tahun 2022 sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Jumlah</u>
Belanja Modal Personal Computer	182.200.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.000.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.986.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	98.750.000,00
Belanja Modal Personal Computer	32.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.125.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	135.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	<u>1.985.807.111,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>2.460.868.111,00</b>

### 3.1.2.2.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN-LRA

Belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 dianggarkan sebesar Rp499.274.200,00 dengan realisasi sebesar Rp475.061.000,00 atau 95,15% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.21**

#### **Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>499.274.200,00</b>	<b>475.061.000,00</b>	<b>95,15%</b>	<b>2.490.000,00</b>

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	99.700.000,00	98.750.000,00	99,05%	840.000,00
2.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.321.700,00	13.986.000,00	97,66%	
3.	Belanja Modal Komputer	385.252.500,00	362.325.000,00	94,05%	1.650.000,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp472.571.000,00 atau naik 18978,76% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.490.000,00.

### 3.1.2.2.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN-LRA

Belanja modal gedung dan bangunan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.985.807.111,00 dengan realisasi sebesar Rp1.985.807.111,00 atau 100,00% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.22**

#### **Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan-LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>1.985.807.111,00</b>	<b>1.985.807.111,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.985.807.111,00	1.985.807.111,00	100,00%	0,00

Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan sedangkan TA 2022 terdapat anggaran sebesar Rp1.985.807.111,00 dengan realisasi 100,00%. Anggaran tersebut diadakan dan digunakan untuk penyelesaian administrasi gedung kantor BPKPAD Kabupaten Temanggung.

### 3.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA-LRA

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Belanja Tak Terduga TA 2022 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

**Tabel 3.23**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga-LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.779.500.000,00</b>
1.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	5.779.500.000,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 tidak ada realisasi dikarenakan tidak adanya belanja tidak terduga di Tahun 2022 sedangkan pada TA 2021 terdapat realisasi sebesar Rp5.779.500.000,00 dikarenakan adanya belanja tidak terduga yang bersifat dana cadangan dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, Santunan kematian, dana darurat dan mendesak.

**3.1.2.4 BELANJA TRANSFER-LRA**

Belanja Transfer TA 2022 dianggarkan sebesar Rp418.390.235.996,00 dengan realisasi sebesar Rp415.972.520.858,00 atau 99,42% dari anggaran.

**Tabel 3.24**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer-LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>418.390.235.996,00</b>	<b>415.972.520.858,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>403.999.817.899,00</b>
1.	Belanja Bagi Hasil	7.951.000.000,00	7.936.684.862,00	99,82%	5.656.124.477,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	410.439.235.996,00	408.035.835.996,00	99,41%	398.343.693.422,00

Belanja Transfer TA 2022 dengan realisasi sebesar Rp415.972.520.858,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp403.999.817.899,00 dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp11.,972.,702.959,00 atau 2,96%. Terdapat beberapa koreksi pengembalian pada belanja Transfer yaitu:

Keterangan	Jumlah
Belanja bantuan keuangan khusus	150.000.000,00

Belanja bantuan keuangan khusus	60.000.000,00
Belanja bantuan keuangan khusus	120.000.000,00
Belanja bantuan keuangan khusus	30.000.000,00
Belanja bantuan keuangan khusus	30.000.000,00
Belanja bantuan keuangan khusus	18.000.000,00
Belanja bantuan keuangan khusus	7.200.000,00
Belanja Bagi Hasil	127.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>415.327.000,00</b>

#### 3.1.2.4.1 BELANJA BAGI HASIL-LRA

Belanja Bagi Hasil TA 2022 dianggarkan sebesar Rp7.951.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.936.684.862,00 atau 99,82% dari anggaran. Belanja Bagi Hasil TA 2022 dirinci dalam tabel berikut:

**Tabel 3.25**

#### **Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil-LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA BAGI HASIL</b>	<b>7.951.000.000,00</b>	<b>7.936.684.862,00</b>	<b>99,82%</b>	<b>5.656.124.477,00</b>
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.951.000.000,00	6.951.000.000,00	100,00%	4.583.400.000,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.000.000.000,00	985.684.862,00	98,57%	1.072.724.477,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp5.656.124.477,00 maka dapat dikatakan Belanja Bagi Hasil naik Rp2.280.560.385,00 atau 40,32%. Terdapat beberapa koreksi atas pengembalian belanja Bagi Hasil sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Koreksi Pengembalian Kelebihan SP2D BPKPAD Nomor 3506146 tanggal 28 September 2022 Belanja DBH Retribusi Daerah kepada Desa Pingit bulan Januari s.d. Juni 2022	<u>127.000,00</u>

**JUMLAH**

**127.000,00**

**3.1.2.4.2 BELANJA BANTUAN KEUANGAN-LRA**

Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp410.439.235.996,00 dengan realisasi sebesar Rp408.035.835.996,00 atau 99,41% dari anggaran.

**Tabel 3.26**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil-LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2021
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>410.439.235.996,00</b>	<b>408.035.835.996,00</b>	<b>99,41%</b>	<b>398.343.693.422,00</b>
1.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	410.439.235.996,00	408.035.835.996,00	99,41%	398.343.693.422,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9,692,142,574.00 atau 2.43% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp398,343,693,422.00. Dari nilai Rp408.035.835.996,00 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Rp162.156.064.996,00 Belanja Bantuan Keuangan Umum dan Khusus serta Rp245.879.771.000,00 Dana Desa. Terdapat beberapa koreksi atas pengembalian belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Koreksi Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Selopampang Kecamatan Selopampang	120.000.000,00
Koreksi Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Lungge Kecamatan Temanggung	60.000.000,00
Koreksi Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Mento Kecamatan Candiroto	150.000.000,00
Koreksi Pengembalian Belanja SP2D 3506968 tanggal 26 Oktober 2022 Bankeudes Senderan Desa Drono Kec. Tembarak	30.000.000,00
Koreksi Pengembalian Belanja SP2D 3507312 tanggal 7 November 2022 Bankeudes Betonisasi Jalan Desa Mondoretno Kec. Bulu	30.000.000,00

Koreksi Pengembalian Belanja SP2D 3507507 tanggal 14 November 2022 Bankeudes Ruas Jalan Desa Muntung Kec. Candioto	18.000.000,00
Koreksi Pengembalian Belanja SP2D 3508845 tanggal 15 Desember 2022 Insentif Ketua RT dan RW Tahap III bulan Juli-September 2022	7.200.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>415.200.000,00</b>

### Surplus (Defisit)

Surplus TA 2022 adalah sebesar Rp1.263.367.288.182,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan	Rp1.698.622.625.487,00
Belanja	<u>(Rp435.255.337.305,00)</u>
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>Rp1.263.367.288.182,00</b>

### 3.1.3. Pendapatan-LO

Penjelasan akun-akun Pendapatan Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022. Pendapatan LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.541.428.223.904,77 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.27**

**Rincian Pendapatan Daerah-LO per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>PENDAPATAN DAERAH - LO</b>	<b>1.541.428.223.904,77</b>	<b>1.440.852.290.048,22</b>	<b>100.575.933.856,55</b>	<b>6,98%</b>
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	110.503.533.724,77	104.018.261.209,82	6.485.272.514,95	6,23%
2.	PENDAPATAN TRANSFER -LO	1.340.196.395.180,00	1.266.786.866.258,00	73.409.528.922,00	5,79%
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-	90.728.295.000,00	70.031.052.000,00	20.697.243.000,00	29,55%

	LO				
4.	SURPLUS NON OPERASIO NAL-LO	0,00	16.110.580,40	(16.110.580,40)	(100,00%)

### 3.1.3.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 sebesar Rp110.503.533.724,77 terdiri atas 3 (tiga) jenis PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.28**

#### Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>110.503.533.724,77</b>	<b>104.018.261.209,82</b>	<b>6.485.272.514,95</b>	<b>6,23%</b>
1.	Pajak Daerah-LO	74.838.725.816,00	53.193.756.634,00	21.644.969.182,00	40,69%
2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	22.735.276.238,40	39.247.350.203,82	(16.512.073.965,42)	(42,07%)
3.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	12.929.531.670,37	11.577.154.372,00	1.352.377.298,37	11,68%

### 3.1.3.1.1 PAJAK DAERAH-LO

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp74.838.725.816,00 terdiri atas pendapatan dari 9 (sembilan) jenis pajak dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 3.29**

#### Rincian Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Pajak Daerah-LO</b>	<b>74.838.725.816,00</b>	<b>53.193.756.634,00</b>	<b>21.644.969.182,00</b>	<b>40,69%</b>
1.	Pajak Hotel-LO	228.953.674,00	165.229.973,00	63.723.701,00	38,57%
2.	Pajak Restoran-LO	2.878.287.838,00	2.118.757.892,00	759.529.946,00	35,85%
3.	Pajak Hiburan-LO	100.279.100,00	14.158.750,00	86.120.350,00	608,25%
4.	Pajak Reklame-LO	849.474.671,00	837.241.926,00	12.232.745,00	1,46%

5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	21.418.648.947,00	17.520.717.057,00	3.897.931.890,00	22,25%
6.	Pajak Parkir-LO	131.790.956,00	115.299.300,00	16.491.656,00	14,30%
7.	Pajak Air Tanah-LO	348.634.395,00	304.901.620,00	43.732.775,00	14,34%
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)-LO	26.037.092.793,00	15.645.362.256,00	10.391.730.537,00	66,42%
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	22.845.563.442,00	16.472.087.860,00	6.373.475.582,00	38,69%

### 3.1.3.1.2 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp22.735.276.238,40 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha) berupa penerimaan dividen, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.30**

#### **Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO</b>	<b>22.735.276.238,40</b>	<b>39.247.350.203,82</b>	<b>(16.512.073.965,42)</b>	<b>(42,07%)</b>
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	22.735.276.238,40	39.247.350.203,82	(16.512.073.965,42)	(42,07%)

### 3.1.3.1.3 LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LO

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp12.929.531.670,37 merupakan PAD yang tidak termasuk selain kedua kategori di atas. Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 terdiri atas 7 (tujuh) jenis pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.31**

#### **Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Lain-lain PAD yang Sah-LO</b>	<b>12.929.531.670,37</b>	<b>11.577.154.372,00</b>	<b>1.352.377.298,37</b>	<b>11,68%</b>
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	255.721.208,00	(255.721.208,00)	(100,00%)
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.010.709.059,37	1.270.789.597,00	739.919.462,37	58,23%
3.	Jasa Giro-LO	467.911.281,00	737.226.286,00	(269.315.005,00)	(36,53%)
4.	Pendapatan Bunga-LO	8.406.164.287,00	7.208.630.169,00	1.197.534.118,00	16,61%
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	11.650.000,00	22.600.000,00	(10.950.000,00)	(48,45%)
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	220.327.089,00	146.264.256,00	74.062.833,00	50,64%
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	154.235.884,00	72.060.286,00	82.175.598,00	114,04%
8.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.658.534.070,00	1.863.862.570,00	(205.328.500,00)	(11,02%)

### 3.1.3.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya berupa Dana Perimbangan, DID, DD, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp1.340.196.395.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.32**

#### **Rincian Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.340.196.395.180,00</b>	<b>1.266.786.866.258,00</b>	<b>73.409.528.922,00</b>	<b>5,79%</b>
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.202.907.447.335,00	1.124.649.577.367,00	78.257.869.968,00	6,96%
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	137.288.947.845,00	142.137.288.891,00	(4.848.341.046,00)	(3,41%)

### 3.1.3.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.202.907.447.335,00 yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Perimbangan dan DID dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.33**

#### **Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>1.202.907.447.335,00</b>	<b>1.124.649.577.367,00</b>	<b>78.257.869.968,00</b>	<b>6,96%</b>
1.	Dana Perimbangan-LO	1.200.469.313.335,00	1.107.500.364.367,00	92.968.948.968,00	8,39%
2.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	2.438.134.000,00	17.149.213.000,00	(14.711.079.000,00)	(85,78%)

### 3.1.3.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan uang dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya berupa Bantuan Keuangan dan Pendapatan bagi hasil seperti Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp137.288.947.845,00 sedangkan pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi merealisasikan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp142.137.288.891,00. Realisasi Pendapatan transfer antar daerah tahun 2022 menurun sebesar Rp4.848.341.046,00 atau 3,41%.

**Tabel 3.34**

#### **Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO</b>	<b>137.288.947.845,00</b>	<b>142.137.288.891,00</b>	<b>(4.848.341.046,00)</b>	<b>(3,41%)</b>
1.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	123.297.875.211,00	104.306.697.630,00	18.991.177.581,00	18,21%

2.	Bantuan Keuangan	13.991.072.634,00	37.830.591.261,00	(23.839.518.627,00)	(63,02%)
----	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------

### 3.1.3.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain yaitu pendapatan hibah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp90.728.295.000,00.

**Tabel 3.35**

#### Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO</b>	<b>90.728.295.000,00</b>	<b>70.031.052.000,00</b>	<b>20.697.243.000,00</b>	<b>29,55%</b>
1.	Pendapatan Hibah-LO	90.728.295.000,00	571.300.000,00	90.156.995.000,00	15781,02%
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	69.459.752.000,00	(69.459.752.000,00)	(100,00%)

### 3.1.4. BEBAN - LO

**Tabel 3.36**

#### Rincian Beban-LO per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>BEBAN DAERAH</b>	<b>189.061.702.397,51</b>	<b>179.333.509.547,46</b>	<b>9.728.192.850,05</b>	<b>5,42%</b>
1.	<b>BEBAN OPERASI</b>				
1.a	Beban Pegawai - LO	13.266.511.323,00	12.200.789.982,00	1.065.721.341,00	8,73%
1.b	Beban Barang dan Jasa	3.933.869.811,00	3.850.129.642,00	83.740.169,00	2,17%
1.c	Beban Penyisihan Piutang	71.744.266,20	42.886.646,20	28.857.620,00	67,29%
1.d	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.217.704.824,31	1.340.937.030,97	(123.232.206,66)	(9,19%)

No	Keterangan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>2.</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>				
2.a	Beban Bagi Hasil	7.936.684.862,00	5.656.124.477,00	2.280.560.385,00	40,32%
2.b	Beban Bantuan Keuangan	162.156.064.996,00	150.461.868.422,00	11.694.196.574,00	70,77%
<b>3.</b>	<b>BEBAN TIDAK TERDUGA</b>				
3.a	Beban Tidak Terduga	0,00	5.779.500.000,00	(5.779.500.000,00)	(100,00%)
<b>4.</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>				
4.a	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	450.199.645,00	1.273.347,29	448.926.297,71	35255,61%
4.b	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	28.922.670,00	0,00	28.922.670,00	100,00%

Beban Daerah Tahun 2022 Rp189.061.702.397,51 meningkat 5,42% dari Beban Daerah Tahun 2021. Beban Daerah Tahun 2022 terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer dan Defisit Non Operasional-LO.

### 3.1.5. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Komposisi dan nilai saldo Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp470.833.697.614,62 yang tersaji sebagai berikut:

**Tabel 3.37**

#### **Saldo Aset-Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>ASET</b>	<b>470.833.697.614,62</b>	<b>436.616.502.172,10</b>	<b>34.217.195.442,52</b>	<b>7,84%</b>

1.	Aset Lancar	103.853.539.830,88	144.639.735.737,08	(40.786.195.906,20)	(28,20%)
2.	Investasi Jangka Panjang	222.606.550.910,34	216.261.329.853,31	6.345.221.057,03	2,93%
3.	Aset Tetap	139.341.006.873,40	67.988.839.834,71	71.352.167.038,69	104,95%
4.	Dana Cadangan	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	100,00%
5.	Aset Lainnya	32.600.000,00	7.726.596.747,00	(7.693.996.747,00)	(99,58%)

### 3.1.5.1 ASET LANCAR

Aset lancar BPKPAD Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp103.853.539.830,88. Aset lancar BPKPAD Kabupaten Temanggung pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp40.786.195.906,20 atau 28,20% dari TA 2021 sebesar Rp144.639.735.737,08. Aset lancar BPKPAD Kabupaten Temanggung dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 3.38**

#### **Saldo Aset Lancar-Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Jenis Aset Lancar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>ASET LANCAR</b>	<b>103.853.539.830,88</b>	<b>144.639.735.737,08</b>	<b>(40.786.195.906,20)</b>	<b>(28,20%)</b>
1.	Kas dan Setara Kas	98.189.629.481,00	118.763.605.711,00	(20.573.976.230,00)	(17,32%)
2.	Piutang Pajak Daerah	4.685.791.536,50	8.162.618.991,50	(3.476.827.455,00)	(42,59%)
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	315.321.229,58	19.633.969.606,58	(19.318.648.377,00)	(98,39%)
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.518.071.502,00	4.233.110.522,00	(1.715.039.020,00)	(40,51%)
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	1.522.636.906,00	1.221.344.271,00	301.292.102,80	24,67%
6.	Penyisihan Piutang	(3.535.183.547,20)	(7.603.016.650,00)	4.067.833.102,80	(53,50%)
7.	Persediaan	157.272.723,00	228.103.285,00	(70.830.562,00)	(31,05%)

Penjelasan :

- Kas dan Setara Kas

<b>Nama Rekening</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Kas di Kas Daerah	<u>98.189.629.481,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>98.189.629.481,00</b>

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah Rp98.189.629.481,00 yang merupakan akumulasi dari seluruh saldo-saldo kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari Nomor Rekening RKUD KAB. TEMANGGUNG, BPD Bank Jateng 1014000431 per 31 Desember 2022 yang telah direkonsiliasikan dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Saldo 2022 (Rp)</b>	<b>Saldo 2021 (Rp)</b>
1	Saldo BKU	98.189.629.481,00	98.189.629.481,00
2	BPD Bank Jateng	98.189.629.481,00	98.189.629.481,00
	Selisih Saldo Kas	0,00	0,00

- **Piutang Pajak Daerah**

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.685.791.536,50 merupakan kewajiban pihak ketiga atas pajak daerah yang hingga 31 Desember 2022 belum disetor oleh wajib pajak ke rekening kas daerah, piutang pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

<b>Nama Rekening</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Piutang Pajak Hotel	800.000,00
Hotel Dirgantara	800.000,00
Piutang Pajak Restoran	18.777.688,00
RM Pesona Ikan Mas	600.000,00
Kledung Park	196.718,00
Kedai Jomer	200.000,00
Angkringan Nyawiji	75.000,00
Warung Bakso Sempurna	200.000,00
Salsabila Resto	50.000,00

RM Fast Chicken Ngadirejo	70.050,00	
RM Fast Chicken Bejen	102.400,00	
RM Fast Chicken Candiroto	75.050,00	
El Chick Steak & Café	100.000,00	
Geprek Mantul/ CV. Mantul Pangan Sejati	590.000,00	
Kedai Kayu Manis	200.000,00	
WLC Coffee	200,000.00	
SDIT Al Qudwah Ngadirejo	684.000,00	
DPC PDI Perjuangan Temanggung	5.775.620,00	
Partai Gerindra Temanggung	950.000,00	
DPC PKB Kabupaten Temanggung	2.990.000,00	
Penyisihan Piutang	5.718.850,00	
Piutang Pajak Hiburan		1.325.000,00
Penyisihan Piutang	1.325.000,00	
Piutang Pajak Reklame		101.930.461,50
Penyisihan Piutang	61.915.381,50	
PT. Bias Promosindo Jaya	7.257.600,00	
PT. Tiga Mas Selaras	5.443.200,00	
CV. Elang Duta Makmur	16.427.880,00	
CV. Illo Promotindo	2.419.200,00	
Apotek Hidup	1.209.600,00	
PT. Tecma Mitratama Advertindo	7.257.600,00	
Piutang Pajak Penerangan Jalan		1.820.752.086,00
PLN	1.820.752.086,00	
Piutang Pajak Parkir		401.250,00
PT. BPR BKK Temanggung	401.250,00	
Piutang Pajak Air Tanah		6.192.840,00

PT. Kelola Agro Makmur	1.002.600,00	
Ceto Farm	39.150,00	
PT. Gudang Garam, Tbk.	4.330.140,00	
CV. Sumber Anugrah	820.950,00	
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		5.607.720,00
Penyisihan Piutang	5.607.720,00	
Piutang PBB-P2		2.729.240.823,00
Penyisihan Piutang	1.884.755.442,70	
Piutang PBB-P2	844.485.380,30	
Piutang BPHTB		763.668,00
Penyisihan Piutang	763.668,00	
<b>Jumlah</b>		<b>4.685.791.536,50</b>

- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp315.321.229,58 yang terdiri atas Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

- Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain – Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.518.071.502,00 yang didalamnya terdapat Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.575.097.485,00, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dirinci sebagai berikut:

<b>Nama Rekening</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.600.000,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	354.034.799,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	<u>2.149.436.703,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>2.518.071.502,00</b>

- Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.522.636.906,00 yang terdiri atas Piutang Bagi Hasil.

- Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.535.183.547,20) sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp7.603.016.650,00). Adapun saldo penyisihan piutang tersebut berasal dari Penyisihan Piutang Pendapatan.

- Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset Lancar Persediaan pada akhir Tahun 2022 senilai Rp157.272.723,00 terdiri dari persediaan barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.582.750,00	3.777.733,00	1,805,017.00	47.78%
Bahan Bakar dan Pelumas	1.920.000,00	6.712.000,00	(4,792,000.00)	(71.39%)
Bahan Lainnya	478.000,00	551.000,00	(73,000.00)	(13.25%)
Suku Cadang Alat Angkutan	7.796.000,00	14.624.000,00	(6,828,000.00)	(46.69%)
Suku Cadang Alat Besar	0,00	141.000,00	(141,000.00)	(100.00%)
Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	138.000,00	(138,000.00)	(100.00%)
Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	15.000,00	(15,000.00)	(100.00%)
Alat Tulis Kantor	9.530.800,00	5.806.500,00	3,724,300.00	64.14%
Kertas dan	16.029.740,00	4.939.000,00	11,090,740.00	224.55%

Cover				
Bahan Cetak	63.984.220,00	169.224.750,00	(105,240,530.00)	(62.19%)
Benda Pos	4.900.000,00	300.000,00	4,600,000.00	1533.33%
Bahan Komputer	37.543.663,00	18.017.500,00	19,526,163.00	108.37%
Perabot Kantor	2.080.550,00	1.252.302,00	828,248.00	66.14%
Alat Listrik	4.995.000,00	389.000,00	4,606,000.00	1184.06%
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.422.000,00	1.041.000,00	1,381,000.00	132.66%
Pakan	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>100.00%</u>
<b>Jumlah</b>	<b>157.272.723,00</b>	<b>228.103.285,00</b>	<b>(70,830,562.00)</b>	<b>(31.05%)</b>

### 3.1.5.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung berbentuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Permanen yang berupa penyertaan modal. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp222.606.550.910,34 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp216.261.329.853,31 bertambah sebesar Rp6.345.221.057,03 atau sebesar 2,93%. Investasi Jangka Panjang BPKPAD Kabupaten Temanggung dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 3.39**

#### **Saldo Investasi Jangka Panjang-Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Jenis Investasi Jangka Panjang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>222.606.550.910,34</b>	<b>216.261.329.853,31</b>	<b>6.345.221.057,03</b>	<b>2,93%</b>
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	406.026.406,40	458.648.211,40	(52.621.805,00)	(11,47%)

2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	222.200.524.503,94	215.802.681.641,91	6.397.842.862,03	2,96%
----	-----------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------

Penjelasan:

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen dari Tahun 2022 mengalami penurunan Rp52.621.805,00 (11,47%) dibanding Tahun 2021 akibat dana bergulir kepada masyarakat di Tahun 2022.
- Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang Permanen yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 berupa penyertaan modal sebesar Rp222.200.524.503,94 dimana jika dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.397.842.862,03 atau 2,96%.

### 3.1.5.3 ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca BPKPAD Kabupaten Temanggung, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Akumulasi Penyusutan. Nilai Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan) dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap tersebut. Saldo aset tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp139.341.006.873,40 dan sebesar Rp67.988.839.834,71 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.40**

#### **Saldo Aset Tetap-Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Jenis Aset Tetap	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>ASET TETAP</b>	<b>139.341.006.873,40</b>	<b>67.988.839.834,71</b>	<b>71.352.167.038,69</b>	<b>104,95%</b>
1.	Tanah	116.954.821.442,00	44.485.158.240,00	72.469.663.202,00	162,91%
2.	Peralatan dan	8.442.465.471,00	8.157.889.610,00	284.575.861,00	3,49%

	Mesin				
3.	Gedung dan Bangunan	24.994.389.501,00	25.279.447.251,00	(285.057.750,00)	(1,13%)
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.859.611.249,00	2.120.787.249,00	(261.176.000,00)	(12,32%)
5.	Aset Tetap Lainnya	143.674.500,00	143.674.500,00	0,00	0,00%
6.	Akumulasi Penyusutan	(13.053.955.289,60)	(12.198.117.015,29)	(855.838.274,31)	7,02%

Penjelasan :

- Aset Tetap berupa Tanah BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Nilai Aset Tanah Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp116.954.821.442,00 dan Rp44.485.158.240,00. Untuk nilai Aset Tanah terdapat penambahan sebesar Rp89.722.395.000,00 dan pengurangan sebesar Rp17.252.731.798,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>	<b>44.485.158.240,00</b>
<b>Mutasi Masuk</b>	<b>89.722.395.000,00</b>
Hibah dari Pihak Ketiga	89.722.395.000,00
<b>Mutasi Keluar</b>	<b>(17.252.731.798,00)</b>
Mutasi ke DPRKPLH	(14.881.676.920,00)
Mutasi ke DPUPR	(672.887.500,00)
Mutasi ke KEC. KALORAN	(48.000.000,00)
Mutasi ke KEC. KRANGGAN	(81.200.000,00)
Mutasi ke KEL. PARAKAN WETAN	(660.288.000,00)
Mutasi ke BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	(659.499.468,00)
Penghapusan (Hibah KEMENAG)	(176.651.910,00)
Penghapusan (Hibah POLRES)	(72.528.000,00)
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>116,954,821,442.00</b>

- Aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Nilai peralatan dan mesin TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp8.442.465.471,00 dan Rp8.157.889.610,00. Mutasi aset peralatan dan mesin TA 2022 bertambah sebesar Rp487.190.600,00 dan berkurang sebesar Rp202.614.739,00. Berikut Mutasi aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2022:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>	<b>8.157.889.610,00</b>
<b>Mutasi Masuk</b>	<b>487.190.600,00</b>
Pengadaan Server Dell	135.000.000,00
BOP Server Dell	950.000,00
Pengadaan CPU	27.200.000,00
Pengadaan PC	175.800.000,00
Pengadaan Laptop	11.200.000,00
BOP PC	950.000,00
Belanja Fotocopy Pengadaan	99.600,00
Pengadaan Printer	13.125.000,00
Pengadaan Meteran Air	98.750.000,00
Pengadaan Rak Penyimpanan	13.986.000,00
Hibah Scanner (Bank Jateng)	5.900.000,00
Mutasi Scanner (Dispusip)	4.230.000,00
<b>Mutasi Keluar</b>	<b>202.614.739,00</b>
Mutasi Kursi (Kesbangpol)	5.250.000,00
Mutasi Kursi (Dinkopdag)	5.250.000,00
Mutasi Kursi (DKPPP)	5.250.000,00
Mutasi Sepeda Motor (Setda)	13.079.454,00

Mutasi Sepeda Motor (Dindukcapil)	17.826.862,00
Mutasi Sepeda Motor (Kec. Kaloran)	12.082.600,00
Mutasi Sepeda Motor (Kec. Tembarak)	13.079.454,00
Penghapusan Kendaraan AA 9505 WE	9.000.000,00
Reklas ke Ekstrakomtabel	121.796.369,00
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>8.442.465.471,00</b>

- Aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai dengan siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut. Nilai gedung dan bangunan TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp24.994.389.501,00 dan Rp25.279.447.251,00. Mutasi aset tetap gedung dan bangunan TA 2022 bertambah sebesar Rp1.985.807.111,00 dan berkurang sebesar Rp285.057.750,00 serta terdapat koreksi atas penyelesaian administrasi Gedung Kantor DPPKAD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 sebesar Rp1.985.807.111,00. Mutasi aset tetap gedung dan bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>	<b>25.279.447.251,00</b>
<b>Mutasi Masuk</b>	<b>1.985.807.111,00</b>
Pembayaran Penyelesaian Utang Piutang DPPKAD Kabupaten Temanggung TA 2015	1.985.807.111,00
<b>Mutasi Keluar</b>	<b>(285.057.750,00)</b>
Penghapusan (Bangunan Gedung Laboratorium Permanen th 2004 /Gedung CT Scan)	(99.230.000,00)
Penghapusan (Pagar Permanen th 2009 /pagar BPS)	(185.827.750,00)
<b>Koreksi</b>	<b>(1.985.807.111,00)</b>
Penyelesaian Utang Piutang DPPKAD Kabupaten Temanggung TA 2015	(1.985.807.111,00)

**Saldo Akhir Per 31 Desember 2022**

**24,994,389,501.00**

- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp1.859.611.249,00 dan Rp2.120.787.249,00. Mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan TA 2022 berkurang sebesar Rp261.176.000,00. Mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dirinci sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>	<b>2.120.787.249,00</b>
<b>Mutasi Keluar</b>	<b>261.176.000,00</b>
Mutasi Ke DPRKPLH	261.176.000,00
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>1.859.611.249,00</b>

- Aset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi dengan tepat ke dalam aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, atau jalan irigasi dan jaringan. Nilai aset tetap lainnya TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp143.674.500,00 dan Rp143.674.500,00. Tidak ada mutasi aset tetap lainnya pada TA 2022.
- Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Akumulasi penyusutan aset tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp13.053.955.289,60 dan Rp12.198.117.015,29. Berikut rincian akumulasi penyusutan aset tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2022:

<b>ASET TETAP</b>	<b>SALDO TA 2021</b>	<b>PENYUSUTAN</b>	<b>KOREKSI</b>	<b>SALDO TA 2022</b>
	<b>(RP)</b>	<b>TA 2022</b>	<b>ATAS</b>	<b>(RP)</b>

## MUTASI

<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(12.198.117.015,29)</b>	<b>(1.171.459.926,31)</b>	<b>315.621.652,00</b>	<b>(13.053.955.289,60)</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.956.122.658,00)	(607.910.918,98)	192.407.237,00	(7.371.626.339,98)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.325.861.124,99)	(499.887.790,02)	84.038.015,00	(4.741.710.900,01)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(773.633.232,30)	(63.661.217,31)	39.176.400,00	(798.118.049,61)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(142.500.000,00)	0,00	0,00	(142.500.000,00)

### 3.1.5.4 DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.000.000.000,00 yang merupakan Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sedangkan pada TA 2021 tidak terdapat dana cadangan.

### 3.1.5.5 ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah Aset Non lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar ataupun aset tetap. Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp32.600.000,00 dan Rp7.726.596.747,00. Aset Lainnya ini terdiri dari (1) Aset Tidak Berwujud, (2) Aset Lain-lain, (3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, (4) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan (5) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lainnya dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 3.41**

**Saldo Aset Lainnya-Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Aset Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>32.600.000,00</b>	<b>7.726.596.747,00</b>	<b>(7.693.996.747,00)</b>	<b>(99,58%)</b>

No	Aset Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Aset Tidak Berwujud	507.306.693,00	1.030.734.420,00	(523.427.727,00)	(50,78%)
2.	Aset Lain-lain	45.350.750,00	225.430.750,00	(180.080.000,00)	(79,88%)
3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(507.306.693,00)	(984.489.522,00)	477.182.829,00	(48,47%)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(45.350.750,00)	(225.430.750,00)	180.080.000,00	(79,88%)
5.	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	32.600.000,00	7.680.351.849,00	(7.647.751.849,00)	(99,58%)

Penjelasan :

- Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp507.306.693,00 mengalami penurunan sebesar Rp523.427.727,00. Perhitungan mutasi yang menyebabkan penurunan saldo ATB dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>	<b>1.030.734.420,00</b>
<b>Mutasi Keluar</b>	<b>523.427.727,00</b>
Penghapusan (Sistem informasi BPHTB dan Pajak Air Tanah)	20.000.000,00
Penghapusan (Aplikasi Pengolah Database PBB)	66.380.017,00
Penghapusan (Coding software PBB)	64.322.710,00
Penghapusan (Manajemen Pendapatan Daerah)	89.955.000,00
Penghapusan (Manajemen Pendapatan Daerah / MAPATDA)	102.735.000,00
Penghapusan (Software penyempurnaan izin reklame)	55.595.000,00

Penghapusan (Software Aplikasi SIMBOS)	30.000.000,00
Penghapusan (Software penyusunan Modul Laporan Pendapatan Daerah)	54.440.000,00
Penghapusan (Sistem informasi manajemen keuangan)	40.000.000,00
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>507.306.693,00</b>

- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp45.350.750,00 dan Rp225.430.750,00. Mengalami penurunan sebesar Rp180.080.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>	<b>225.430.750,00</b>
<b>Mutasi Keluar</b>	<b>180.080.000,00</b>
Penghapusan (Mapada)	40.500.000,00
Penghapusan (Sistem informasi anggaran keuangan daerah)	40.000.000,00
Penghapusan (Sistem informasi gaji)	40.000.000,00
Penghapusan (Sistem informasi manajemen barang daerah /Simbada)	49.500.000,00
Penghapusan (Aplikasi pembukuan dan pembayaran PBB-P2)	10.080.000,00
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>45.350.750,00</b>

- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp507.306.693,00 dan Rp984.489.522,00. Mengalami penurunan sebesar Rp477.182.829,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>ASET LAINNYA</b>	<b>SALDO TA 2021 (RP)</b>	<b>PENYUSUTAN TA 2022</b>	<b>KOREKSI ATAS MUTASI</b>	<b>SALDO TA 2022 (RP)</b>
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(984.489.522,00)</b>	<b>(46.244.898,00)</b>	<b>523.427.727,00</b>	<b>(507.306.693,00)</b>
Software Penatausahaan Keuangan	(323.714.286,00)	(46.244.898,00)	0,00	(369.959.184,00)

<b>ASET LAINNYA</b>	<b>SALDO TA 2021 (RP)</b>	<b>PENYUSUTA N TA 2022</b>	<b>KOREKSI ATAS MUTASI</b>	<b>SALDO TA 2022 (RP)</b>
Sistem informasi akuntansi keuangan daerah(desentralistik)	(40.000.000,00)	0,00	0,00	(40.000.000,00)
Aplikasi sistem operasi PBB	(19.487.870,00)	0,00	0,00	(19.487.870,00)
Aplikasi pengolah peta PBB	(32.482.280,00)	0,00	0,00	(32.482.280,00)
Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Penyusunan sistem informasi penatausahaan keuangan	(15.000.000,00)	0,00	0,00	(15.000.000,00)
Oracle AII Paket Instan	(24.377.359,00)	0,00	0,00	(24.377.359,00)
Sistem informasi BPHTB dan Pajak Air Tanah	(20.000.000,00)	0,00	(20.000.000,00)	0,00
Aplikasi Pengolah Database PBB	(66.380.017,00)	0,00	(66.380.017,00)	0,00
Coding software PBB	(64.322.710,00)	0,00	(64.322.710,00)	0,00
Manajemen Pendapatan Daerah	(89.955.000,00)	0,00	(89.955.000,00)	0,00
Manajemen Pendapatan Daerah / MAPATDA	(102.735.000,00)	0,00	(102.735.000,00)	0,00
Software penyempurnaan izin reklame	(55.595.000,00)	0,00	(55.595.000,00)	0,00
Software	(30.000.000,00)	0,00	(30.000.000,00)	0,00

ASET LAINNYA	SALDO TA 2021 (RP)	PENYUSUTAN TA 2022	KOREKSI ATAS MUTASI	SALDO TA 2022 (RP)
Aplikasi SIMBOS				
Software penyusunan Modul Laporan Pendapatan Daerah	(54.440.000,00)	0,00	(54.440.000,00)	0,00
Sistem informasi manajemen keuangan	(40.000.000,00)	0,00	(40.000.000,00)	0,00

- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp45.350.750,00 dan Rp225.430.750,00. Mengalami penurunan sebesar Rp180.080.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

ASET LAINNYA	SALDO TA 2021 (RP)	PENYUSUTAN TA 2022	KOREKSI ATAS MUTASI	SALDO TA 2022 (RP)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>(225.430.750,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.080.000,00</b>	<b>(45.350.750,00)</b>
Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (sentralistik)	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Mapada	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	0,00
Sistem informasi gaji	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
Sistem informasi anggaran keuangan daerah	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
Sistem informasi manajemen barang daerah (simbada)	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00
Aplikasi Pembukuan dan Pembayaran PBB-P2	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin Rusak Berat (Radio)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Peralatan dan Mesin Rusak Berat (Amplifier)	1.170.750,00	0,00	0,00	1.170.750,00
Peralatan dan Mesin Rusak Berat (Lemari Kaca)	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
Mesin Porporasi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Stabilisator	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Trolley	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

- Kas Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas. Kas yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek / retensi pada Tahun 2022 sebesar Rp7.680.351.849,00. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp32.600.000,00 dan Rp7.680.351.849,00. Mengalami penurunan sebesar Rp7.647.751.849,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2022</b>	<b>7.680.351.849,00</b>
<b>Penambah</b>	<b>32.600.000,00</b>
Penerimaan kas daerah yang bersumber dari dana BOP yang belum disetorkan ke RKUN	32.600.000,00
<b>Pengurang</b>	<b>(7.680.351.849,00)</b>
Pengeluaran Retensi	(7.680.351.849,00)
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>32.600.000,00</b>

### 3.1.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek antara lain dapat berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah Kewajiban

Jangka Pendek dengan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.733.204.553,09 dan Rp13.041.802.091,46. Saldo sebesar Rp3.733.204.553,09 tersebut merupakan kewajiban jangka pendek BPKPAD Kabupaten Temanggung yang masih terhutang sampai dengan 31 Desember 2022 turun sebesar Rp9.308.597.538,37 atau 71,38% dari saldo tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.42**

**Saldo Kewajiban - Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>3.733.204.553,09</b>	<b>13.041.802.091,46</b>	<b>(9.308.597.538,37)</b>	<b>(71,38%)</b>
1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.733.204.553,09	13.041.802.091,46	(9.308.597.538,37)	(71,38%)
1.a	Pendapatan Diterima Dimuka	2.112.831.185,09	2.145.132.023,46	(32.300.838,37)	(1,51%)
1.b	Utang Belanja	1.584.618.944,00	3.216.318.219,00	(1.631.699.275,00)	(50,73%)
1.c	Utang Jangka Pendek Lainnya	35.754.424,00	7.680.351.849,00	(7.644.597.425,00)	(99,53%)

Penjelasan :

- Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa sebesar Rp2.112.831.185,09 sedangkan pada Tahun 2021 merupakan Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III sebesar Rp2.145.132.023,46. Sehingga Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 turun sebesar Rp32.300.838,37 atau 1,51% dibanding Tahun 2021. Pendapatan Diterima Dimuka dirinci sebagai berikut:

<b>PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA</b>	<b>Rp2.112.831.185,09</b>
<b>Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa</b>	<b>Rp2.112.831.185,09</b>
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	Rp264.321.404,76
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	R1.848.509.780,33

- Utang Belanja

Utang belanja BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2022 sebesar Rp1.584.618.944,00 yang terdiri atas utang belanja pegawai (Rp1.512.948.502,00) dan utang belanja barang dan jasa (Rp71.670.442,00) sedang pada Tahun 2021 saldo Utang Belanja BPKPAD Kabupaten Temanggung sebesar Rp3.216.318.219,00 yang terdiri atas Utang belanja pegawai (Rp1.154.391.500,00), Utang belanja barang dan jasa (Rp76.119.608,00) serta Utang belanja Modal Gedung dan Bangunan (1.985.807.111,00) mengalami penurunan sebesar RP1.631.699.275,00 atau 50,73%. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut:

<b>UTANG BELANJA</b>	<b>Rp1.584.618.944,00</b>
<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>Rp1.512.948.502,00</b>
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp165.948.502,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel	Rp2.075.000,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	Rp47.206.250,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	Rp2.905.000,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	Rp15.562.500,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	Rp357.937.500,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	Rp2.282.500,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	Rp4.876.250,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan	Rp311.250.000,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp373.915.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH	Rp425.000,00

atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi  
KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH  
atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi  
KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak  
Restoran Rp9.668.750,00

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH  
atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi  
KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak  
Hiburan Rp595.000,00

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH  
atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi  
KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak  
Reklame Rp3.187.500,00

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH  
atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi  
KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak  
Penerangan Rp73.312.500,00

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH  
atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi  
KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir  
Rp467.500,00

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH  
atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi  
KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air  
Tanah Rp998.750,00

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH  
atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi  
KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi  
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
Rp63.750.000,00

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH  
atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi  
KDH/WKDH atas Pemungutan Bea  
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  
Rp76.585.000,00

**Utang Belanja Barang dan Jasa Rp71.670.442,00**

Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga  
Administrasi Rp28.000.000,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga  
Kebersihan Rp14.000.000,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga  
Keamanan Rp10.800.000,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Rp606.072,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air Rp2.410.600,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik Rp15.853.770,00

- Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp35.754.424,00 sedangkan pada Tahun 2021 Utang Jangka Pendek Lainnya BPKPAD Kabupaten Temanggung adalah Utang Kelebihan Pembayaran PAD sebesar Rp7.680.351.849,00. Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

<b>UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA</b>	<b>Rp35.754.424,00</b>
<b>Utang Kelebihan Pembayaran Transfer</b>	<b>Rp35.754.424,00</b>
Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP PAUD	Rp32.600.000,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	Rp3.154.424,00

### 3.1.7. Ekuitas Dana

**Tabel 3.43**

**Saldo Ekuitas-Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>423.574.674.225,64</b>	<b>20.252.002.816,83</b>
2.	Surplus / (Defisit) LO	1.352.366.521.507,26	1.261.518.780.500,76
3.	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	(125.869.993.210,37)	317.074.500.690,05
4.	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(1.182.970.709.461,00)	(1.175.270.609.782,00)
5.	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>467.100.493.061,53</b>	<b>423.574.674.225,64</b>

Transaksi yang menyebabkan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

<b>Saldo Awal</b>	<b>423.574.674.225,64</b>
<b>Penambah</b>	<b>10.777.526.675</b>
Mencatat mutasi piutang pembangunan gedung Dindukcapil yang pelunasannya terdapat di BPKPAD	1.614.621.595,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Jalan, Jaringan dan Irigasi mutasi ke DPRKPLH Tahun 2022	39.176.400,00

Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin hibah Scanner dari Dispusip Tahun 2022	4.230.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Kesbangpol Tahun 2022	5.250.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Dinkopdag Tahun 2022	5.250.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke DKPPP Tahun 2022	5.250.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Setda Tahun 2022	13.079.454,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Dindukcapil Tahun 2022	17.826.862,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Kecamatan Kaloran Tahun 2022	12.082.600,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Kecamatan Tembarak Tahun 2022	13.079.454,00
Mencatat jurnal perhitungan investasi PD BPR BKK Temanggung Tahun 2022	660.539.000,00
Mencatat perhitungan investasi PD Apotek Waringin Mulyo Tahun 2022	496.567,00
Mencatat perhitungan investasi PD Air Minum Temanggung Tahun 2022	7.862.804.629,00
Mencatat perhitungan investasi PD Bhumi Phala Wisata Tahun 2022	523.840.114,00
<b>Pengurang</b>	<b>136.647.519.885,37</b>
Mencatat pelimpahan kas dana BOS SD dan BOP Kesetaraan kepada Dindikpora	28.264.690.509,00
Mencatat pelimpahan kas dana BOS SMP kepada Dindikpora	15.232.709.829,00
Mencatat pelimpahan kas BOP PAUD kepada Dindikpora	6.571.935.000,00
Mencatat Mutasi Kas BOS SD dan SMP Semester II ke Dindikpora	37.172.119.563,00
Mencatat mutasi kas BOP PAUD Semester II ke Dindikpora	5.686.176.000,00
Mencatat mutasi kas BOP Kesetaraan Semester II ke Dindikpora	1.798.320.000,00
Mencatat mutasi kas lainnya atas Potongan DAU belanja vaksinator ke Dinkes	1.297.200.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Jalan, Jaringan dan Irigasi mutasi ke DPRKPLH Tahun 2022	261.176.000,00

Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin Reklas Ekstrakomptabel Tahun 2022	10.207.502,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Tanah mutasi ke DPRKPLH Tahun 2022	14.881.676.920,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Tanah mutasi ke DPUPR Tahun 2022	672.887.500,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Tanah mutasi ke Kec. Kaloran Tahun 2022	48.000.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Tanah mutasi ke Kec. Kranggan Tahun 2022	81.200.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Tanah mutasi ke Kec. Parakan Wetan Tahun 2022	660.288.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Tanah mutasi ke Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2022	659.499.468,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Kesbangpol Tahun 2022	5.250.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Dinkopdag Tahun 2022	5.250.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke DKPPP Tahun 2022	5.250.000,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Setda Tahun 2022	13.079.454,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Dindukcapil Tahun 2022	17.826.862,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Kecamatan Kaloran Tahun 2022	12.082.600,00
Mencatat jurnal koreksi atas mutasi/koreksi aset Peralatan dan Mesin mutasi ke Kecamatan Tembarak Tahun 2022	13.079.454,00
Mencatat perhitungan jurnal perhitungan investasi PD BPR Bank Pasar Tahun 2022	6.986.312.553,15
Mencatat jurnal perhitungan investasi PD BPR BKK Temanggung Tahun 2022	1.080.961.152,22
Mencatat perhitungan investasi PD Apotek Waringin Mulyo Tahun 2022	284.681.797,00
Mencatat perhitungan investasi PD Air Minum Temanggung Tahun 2022	14.036.569.773,00
Mencatat perhitungan investasi PD Aneka Usaha Tahun 2022	96.920.152,00
Mencatat perhitungan investasi PD Bhumi Phala Wisata	792.169.797,00

Tahun 2022

<b>EKUITAS</b>	<b>297.704.681.015,27</b>
<b>Surplus / (Defisit) LO</b>	<b>1.352.366.521.507,26</b>
<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>(1.182.970.709.461,00)</b>
<b>EKUITAS 31 DESEMBER 2022</b>	<b>467.100.493.061,53</b>

**3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.**

Laporan keuangan BPKPAD adalah laporan keuangan gabungan dengan SKPKD sehingga nilai yang dilaporkan adalah hasil konsolidasi antara OPD dengan SKPKD.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **A. Domisili dan bentuk hukum**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

#### **C. Dasar Hukum Operasional Kegiatan**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

#### **D. Pejabat Struktural selama tahun berjalan .**

Pada akhir tahun 2022, susunan Pejabat Eselon II, Eselon III & Eselon IV sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Susunan Pejabat Struktural Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Pejabat</b>
1	Eselon	KEPALA BADAN	TRI WINARNO,

No	Eselon	Jabatan	Nama Pejabat
	II/b	PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	S.E.,M.M.
2	Eselon III/a	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	HUSEIN TSANI UBADDILLAH, SE, M.Si
3	Eselon III/b	KEPALA BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN	Dra. DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.
4	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	YUSI SUSANTI, SIP, MM
5	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	HILMY TINIKE DHAMAYANTI, SE, MM
6	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENGANGGARAN	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.
7	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	KARTIKA SARI, ST, M.Eng
8	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	FERRY WISNUCAHYO B, SE, MM
9	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN	ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
10	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI	ZIADATUN NI'MAH, SE, M.Acc.
11	Eselon IV/a	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NELY NIAMAH HANI, S.Sos,MM
12	Eselon IV/a	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	SRI INTARTI
13	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH	NURUL LAILY PRIYANSEPTI, SE
14	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN BELANJA	LUTFI AMALIYAH, SE
15	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN	TATAG WAHYUDI, S.Sos
16	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	EKO MEDISUSANTO SUWIYANTANA, ST, MM
17	Eselon	KEPALA SUB BIDANG	KETUT WAHYU

<b>No</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Pejabat</b>
	IV/a	ADMINISTRASI ANGGARAN	ARDHIYANTO, S.E.
18	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	KARTINI YOGANINGSIH, SE MM
19	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN PENETAPAN	TEGUH SUPRIYANTO, SE, M.Si
20	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN BARANG MILIK DAERAH	STALIS KURNIAWAN, S.Sos
21	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	SUMARNA, S.Sos
22	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	ISKAK, SE

## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pengelolaan keuangan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah memerlukan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan yang dilaksanakan selama Tahun anggaran 2022 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketataan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi maupun dalam teknik pelaksanaannya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 197310201999031005